Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi Lokal

Desi Setianingsih[1], Salis M Abduh[2]
Universitas Muhammadiyah Kotabumi
Email: desymobile49@gmail.com, salis.abduh@umko.ac.id

Article History:
Received: 30 Januari 2025
Revised: 15 Maret 2025
Accepted: 20 Maret 2025

Keywords: *BUMDes, pengelolaan usaha desa, kemandirian ekonomi, tata kelola, inovasi, strategi bisnis.*

Abstract: *Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi lokal dengan memanfaatkan potensi desa secara optimal. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan BUMDes masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya inovasi, serta kendala dalam aspek tata kelola dan pemasaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan BUMDes yang efektif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi desa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berbasis kajian literatur serta analisis terhadap berbagai model pengelolaan BUMDes yang telah berhasil di beberapa daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan BUMDes sangat dipengaruhi oleh penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel, inovasi berbasis potensi lokal, pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran dan operasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi dengan pemerintah dan sektor swasta. Temuan ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah desa dan pengelola BUMDes untuk memperkuat strategi bisnis yang adaptif serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan usaha desa. Dengan strategi yang tepat, BUMDes dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang berkelanjutan dan mampu mewujudkan desa yang lebih mandiri secara ekonomi.*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi desa merupakan pilar utama dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi ketimpangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. (Ramadhan Lubis et al. 2024). Desa memiliki potensi ekonomi yang besar, baik dari sektor pertanian, perikanan, pariwisata, maupun industri kreatif. Namun, tanpa pengelolaan yang tepat, potensi tersebut tidak akan mampu berkembang secara optimal. (Ekonomi 2024).Oleh karena itu, pemerintah menginisiasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai instrumen dalam penguatan ekonomi berbasis masyarakat desa. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu

menjadi penggerak utama dalam mengelola sumber daya lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

BUMDes merupakan bentuk inovasi kebijakan ekonomi yang mengedepankan prinsip kemandirian ekonomi desa melalui pengelolaan usaha yang berbasis pada potensi lokal. Sebagai lembaga usaha, BUMDes berperan dalam mengelola berbagai unit bisnis yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik desa, seperti usaha simpan pinjam, penyediaan barang dan jasa, pengolahan hasil pertanian, pengelolaan objek wisata desa, hingga bisnis digital berbasis *e-commerce*. Melalui keberadaan BUMDes, desa memiliki kesempatan untuk tidak hanya menjadi konsumen dalam sistem ekonomi nasional, tetapi juga bertransformasi menjadi produsen yang mampu bersaing di pasar yang lebih luas. (Jayadi 2024).

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan BUMDes masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama yang sering ditemukan adalah kurangnya tata kelola yang baik dan profesional. (Adolph 2024). Studi yang dilakukan oleh (Syahsudarmi et al., n.d.). mengungkapkan bahwa banyak BUMDes di Indonesia belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, sehingga pengelolaan usaha cenderung tidak terstruktur, kurang efisien, dan tidak memiliki sistem akuntabilitas yang kuat . Ketiadaan SOP ini menyebabkan BUMDes rentan terhadap praktik manajerial yang kurang transparan, yang pada akhirnya dapat menghambat keberlanjutan usaha desa. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Azhari et al. 2023) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan BUMDes menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan usaha desa . Banyak pengelola BUMDes yang belum memiliki keterampilan dalam bidang manajemen keuangan, pemasaran digital, serta strategi bisnis yang adaptif. Rendahnya tingkat kapasitas SDM ini menyebabkan sebagian besar BUMDes mengalami stagnasi atau bahkan mengalami kegagalan dalam mengembangkan usaha yang mereka kelola. Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi aspek yang sangat krusial dalam membangun BUMDes yang kompetitif dan berkelanjutan.

Dalam teori ekonomi pembangunan, pendekatan Teori Pemberdayaan Masyarakat yang dikemukakan oleh Chambers, menekankan bahwa pembangunan ekonomi desa tidak bisa hanya bergantung pada intervensi pemerintah, melainkan harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya lokal. Hal ini sejalan dengan prinsip *community-based development*, di mana masyarakat desa menjadi aktor utama dalam merencanakan, mengelola, dan mengambil keputusan strategis terkait usaha yang mereka jalankan. (Boge Triatmanto , et al., 2024). Dengan demikian, BUMDes yang dikelola dengan pendekatan partisipatif akan lebih memiliki daya tahan dalam menghadapi tantangan ekonomi dan lebih mampu menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Pendekatan lainnya yang relevan dalam pengelolaan BUMDes adalah Teori Tata Kelola yang Baik *(Good Governance Theory)* yang dikembangkan oleh *United Nations Development Programme*. (Elvia, Adnan, and Khaidir 2025). Teori ini menekankan bahwa keberhasilan sebuah organisasi, termasuk BUMDes, sangat bergantung pada penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola. Jika prinsip-prinsip ini diterapkan dengan baik, maka BUMDes tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan desa tetapi juga menciptakan sistem usaha yang lebih berkelanjutan dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Selain permasalahan tata kelola dan kapasitas SDM, digitalisasi dalam pengelolaan BUMDes juga menjadi tantangan tersendiri. Di era industri 4.0, keberadaan teknologi informasi dapat menjadi faktor pendukung utama dalam meningkatkan

efektivitas bisnis desa. Studi yang dilakukan oleh (Rizky Mulyana, et al., 2024) menunjukkan bahwa BUMDes yang mampu memanfaatkan digitalisasi dalam pemasaran dan operasional usaha cenderung memiliki daya saing lebih tinggi dibandingkan dengan BUMDes yang masih menggunakan metode konvensional . Oleh karena itu, transformasi digital melalui penggunaan *e-commerce*, pemasaran berbasis media sosial, serta sistem keuangan berbasis digital menjadi langkah yang penting untuk meningkatkan daya saing BUMDes dalam skala yang lebih luas. Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek penting dalam pengelolaan BUMDes. Penelitan- penelitian terdahulu tersebut lebih menitikberatkan pada peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi desa, lalu menyoroti pentingnya penerapan SOP dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan BUMDes. Serta, Azhari et menekankan bahwa pengembangan sumber daya manusia merupakan elemen kunci dalam menciptakan BUMDes yang berdaya saing .

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, kajian ini lebih menyoroti strategi pengelolaan yang mencakup aspek tata kelola, penguatan SDM, serta digitalisasi usaha sebagai faktor kunci dalam meningkatkan keberlanjutan dan daya saing BUMDes. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan BUMDes yang efektif dalam mendorong kemandirian ekonomi lokal. Kajian ini akan berfokus pada identifikasi tantangan utama dalam pengelolaan BUMDes serta perumusan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas usaha, daya saing, serta keberlanjutan ekonomi desa. Dengan memahami strategi pengelolaan yang tepat, diharapkan BUMDes dapat berfungsi sebagai penggerak utama dalam pembangunan ekonomi desa yang mandiri, inovatif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendorong kemandirian ekonomi lokal. Analisis data dilakukan secara tematik melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan guna mengidentifikasi pola-pola dalam tata kelola, tantangan, serta strategi yang diterapkan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai strategi optimal dalam pengelolaan BUMDes guna meningkatkan keberlanjutan ekonomi desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Kelola BUMDes: Implementasi dan Tantangan dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Desa

Tata kelola yang baik menjadi fondasi utama dalam menjamin keberlanjutan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Dalam implementasinya, BUMDes harus mampu menjalankan prinsip *good governance*, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta efektivitas dalam pengelolaan usaha. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem manajemen yang profesional, mencegah konflik kepentingan, serta memastikan bahwa setiap keuntungan yang diperoleh benar-benar kembali kepada masyarakat desa. Namun, dalam praktiknya, masih banyak kendala yang dihadapi oleh BUMDes dalam menerapkan sistem tata kelola yang ideal. (Pengembangan et al. 2025).

Salah satu tantangan utama adalah minimnya regulasi internal dan mekanisme kontrol dalam operasional usaha. Banyak BUMDes yang masih mengelola keuangan dan administrasi secara manual tanpa adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku. Akibatnya, pencatatan keuangan sering kali tidak terstruktur dengan baik, yang berisiko menyebabkan

kebocoran anggaran atau penyalahgunaan dana. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan, yang menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes. Tanpa sistem akuntansi yang jelas dan transparan, sulit bagi pengelola maupun pemangku kepentingan lainnya untuk mengukur sejauh mana kinerja BUMDes dalam memberikan manfaat ekonomi bagi desa.

Selain permasalahan administrasi, tata kelola BUMDes juga menghadapi tantangan dalam aspek kepemimpinan dan manajemen sumber daya manusia. Pemilihan pengelola BUMDes yang tidak berbasis kompetensi menjadi kendala serius dalam memastikan efektivitas manajemen usaha desa. Di beberapa desa, penunjukan pengelola masih didasarkan pada kedekatan dengan kepala desa, bukan pada kapabilitas dan pengalaman dalam bidang usaha. Hal ini berdampak pada rendahnya kapasitas pengelola dalam menyusun strategi bisnis, melakukan analisis pasar, serta mengembangkan inovasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing usaha BUMDes. Tanpa kepemimpinan yang profesional, BUMDes cenderung berjalan stagnan atau bahkan mengalami kegagalan dalam mengelola unit usaha yang dimilikinya.

Kurangnya mekanisme pengawasan yang ketat juga menjadi faktor yang memperburuk tata kelola BUMDes. Tidak adanya sistem evaluasi yang jelas menyebabkan banyak BUMDes berjalan tanpa target atau indikator keberhasilan yang terukur. Beberapa BUMDes bahkan tidak memiliki laporan pertanggungjawaban yang terdokumentasi dengan baik, yang pada akhirnya mempersulit proses audit dan pengawasan dari pemerintah desa maupun lembaga terkait. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dibentuk dewan pengawas independen yang terdiri dari unsur masyarakat, akademisi, serta pemerintah daerah guna memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan strategis yang diambil oleh BUMDes selaras dengan prinsip tata kelola yang baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat desa.

Di era digital, penerapan teknologi dalam sistem tata kelola BUMDes menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan usaha desa. (Rohayatin et al. 2024). Sayangnya, masih banyak BUMDes yang belum memanfaatkan teknologi digital dalam operasionalnya. Sebagian besar pencatatan transaksi masih dilakukan secara konvensional, yang tidak hanya memperlambat proses pelaporan tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan dalam pencatatan keuangan. Oleh karena itu, digitalisasi dalam tata kelola BUMDes perlu dioptimalkan, misalnya dengan menerapkan sistem keuangan berbasis aplikasi, penggunaan *e-commerce* dalam pemasaran produk, serta pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan promosi usaha desa. Dengan menerapkan teknologi digital, BUMDes tidak hanya dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing di tingkat regional maupun nasional.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung operasional BUMDes. Meskipun BUMDes dirancang sebagai lembaga usaha berbasis komunitas, tingkat keterlibatan masyarakat dalam berbagai aspek pengelolaan usaha masih tergolong rendah. Banyak masyarakat desa yang belum memahami secara menyeluruh manfaat keberadaan BUMDes, sehingga tidak aktif berpartisipasi dalam mendukung produk atau layanan yang ditawarkan. (Artikel 2024). Selain itu, kurangnya keterbukaan informasi dari pihak pengelola juga menyebabkan masyarakat kurang merasa memiliki terhadap BUMDes yang sebenarnya dibentuk untuk kesejahteraan mereka. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, diperlukan strategi sosialisasi yang lebih efektif, seperti pelibatan warga dalam perencanaan usaha, program edukasi terkait manfaat BUMDes, serta skema kepemilikan usaha berbasis investasi masyarakat. Dengan meningkatnya keterlibatan masyarakat, BUMDes dapat tumbuh sebagai entitas bisnis yang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga desa.

Selain masalah internal, tata kelola BUMDes juga sangat dipengaruhi oleh dukungan dari pemerintah dan sektor swasta. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan regulasi yang mendukung pertumbuhan usaha desa, termasuk kebijakan terkait insentif fiskal, akses permodalan, serta penyediaan infrastruktur yang mendukung pengembangan usaha. Tanpa regulasi yang jelas dan berpihak pada penguatan ekonomi desa, banyak BUMDes yang kesulitan mendapatkan akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk berkembang. Oleh karena itu, kebijakan yang mendorong pemberdayaan ekonomi desa melalui BUMDes harus diperkuat, baik dalam aspek pendanaan, pelatihan, maupun pendampingan teknis yang dapat membantu meningkatkan kapasitas pengelola usaha desa.

Selain regulasi, kolaborasi dengan sektor swasta juga menjadi strategi yang dapat meningkatkan keberlanjutan BUMDes. Banyak perusahaan yang memiliki program tanggung jawab sosial (CSR) yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan usaha desa. Kerja sama dengan sektor swasta dapat membuka peluang bagi BUMDes untuk mengakses jaringan pasar yang lebih luas, memperoleh investasi tambahan, serta mendapatkan transfer pengetahuan dalam manajemen usaha. Dengan adanya sinergi antara BUMDes, pemerintah, dan sektor swasta, ekosistem usaha desa dapat berkembang secara lebih profesional dan kompetitif.

Berdasarkan berbagai tantangan yang telah diuraikan, strategi perbaikan tata kelola BUMDes harus mencakup beberapa aspek utama. Pertama, diperlukan penerapan sistem manajemen berbasis Standar Operasional Prosedur (SOP) guna meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan usaha. Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan bisnis menjadi langkah yang perlu diutamakan agar pengelola BUMDes memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan unit usaha. Ketiga, pemanfaatan teknologi digital perlu dioptimalkan untuk mendukung sistem pencatatan keuangan yang lebih modern serta mempercepat akses pasar bagi produk-produk desa. Keempat, penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi harus diterapkan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dalam pengelolaan BUMDes selaras dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Terakhir, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus terus ditingkatkan guna menciptakan ekosistem usaha desa yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan dalam tata kelola, BUMDes dapat berfungsi secara lebih optimal dalam mendukung kemandirian ekonomi desa. Sistem pengelolaan yang kuat akan memastikan bahwa usaha desa tidak hanya mampu bertahan dalam jangka pendek, tetapi juga berkembang menjadi entitas bisnis yang berdaya saing serta memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat desa. Melalui penerapan tata kelola yang baik, BUMDes dapat menjadi lokomotif utama dalam memperkuat ekonomi pedesaan dan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kualitas Sumber Daya Manusia sebagai Faktor Penentu Keberhasilan BUMDes

Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten menjadi elemen kunci dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tanpa adanya pengelola yang memiliki kapasitas manajerial, keterampilan teknis, serta pemahaman yang baik terhadap dinamika usaha, BUMDes akan sulit berkembang dan berkontribusi secara optimal terhadap perekonomian desa. Kualitas SDM yang rendah sering kali menjadi penyebab utama stagnasi usaha BUMDes, karena banyak pengelola yang belum memiliki kemampuan dalam perencanaan bisnis, pengelolaan keuangan, serta strategi pemasaran. (Wulandari and Lestari 2024).

Kendala utama dalam aspek SDM BUMDes adalah masih minimnya program

pelatihan yang sistematis dan berkelanjutan. (Meida Rachmawati 2024). Banyak pengelola yang menjalankan usaha tanpa memiliki latar belakang manajemen atau kewirausahaan yang memadai, sehingga berbagai keputusan strategis lebih banyak diambil berdasarkan intuisi daripada analisis yang berbasis data. Ketidaksiapan ini mengakibatkan BUMDes sering kali mengalami kesulitan dalam mengembangkan unit usaha yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan dalam memahami aspek hukum dan regulasi yang berlaku juga menjadi tantangan dalam mengelola administrasi dan keuangan secara transparan serta akuntabel.

Kualitas kepemimpinan dalam struktur organisasi BUMDes juga menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilannya. Pemimpin yang visioner, memiliki keterampilan komunikasi yang baik, serta mampu membangun jejaring dengan berbagai pihak akan lebih mudah mengarahkan BUMDes menuju pertumbuhan yang lebih stabil. (Hintalo, Aneta, and Tohopi 2024). Namun, dalam banyak kasus, pengelola BUMDes masih dipilih berdasarkan kedekatan dengan pemerintah desa daripada berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Akibatnya, pengelolaan usaha sering kali berjalan tanpa strategi yang jelas, serta kurangnya inovasi dalam menjawab tantangan dan peluang pasar. Untuk meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan, sistem rekrutmen berbasis kompetensi perlu diterapkan agar BUMDes dapat dikelola oleh individu yang benar-benar memiliki keahlian dalam bisnis dan manajemen usaha.

Selain aspek manajerial, penguasaan teknologi juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas SDM BUMDes. Di era digital, pemanfaatan teknologi informasi dalam operasional usaha desa dapat meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat pencatatan transaksi, serta memperluas akses pasar melalui strategi pemasaran berbasis digital. Sayangnya, banyak pengelola BUMDes yang masih mengalami kesulitan dalam mengadopsi teknologi karena rendahnya literasi digital. Kurangnya pemahaman terhadap sistem keuangan berbasis aplikasi, pemasaran digital, serta platform *e-commerce* membuat banyak BUMDes tertinggal dalam persaingan usaha dengan sektor swasta lainnya. Jika tidak ada upaya peningkatan keterampilan digital bagi pengelola, BUMDes akan semakin sulit berkembang dan kehilangan daya saing di tengah perubahan ekonomi yang semakin dinamis.

Dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas SDM dalam pengelolaan BUMDes. Pemerintah desa dapat berperan dalam menyediakan akses terhadap pelatihan dan pendampingan teknis bagi pengelola, baik melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan, maupun sektor swasta. Selain itu, pendampingan dari akademisi dan praktisi bisnis juga dapat membantu meningkatkan pemahaman pengelola dalam menyusun perencanaan usaha yang lebih sistematis serta menerapkan praktik tata kelola yang lebih profesional.

Tidak hanya dari sisi pelatihan, keterlibatan masyarakat dalam mendukung operasional BUMDes juga menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas SDM. Dengan adanya partisipasi aktif masyarakat, baik sebagai pelanggan, mitra usaha, maupun investor lokal, pengelola BUMDes akan lebih terdorong untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka dalam mengelola usaha. Selain itu, keterbukaan informasi dan transparansi dalam operasional BUMDes juga perlu ditingkatkan agar masyarakat memiliki kepercayaan lebih terhadap keberlanjutan usaha yang dijalankan.

Meningkatkan kualitas SDM dalam pengelolaan BUMDes tidak hanya berdampak pada peningkatan efektivitas operasional usaha desa, tetapi juga memperkuat daya saing BUMDes dalam skala yang lebih luas. Dengan SDM yang kompeten, BUMDes dapat mengembangkan model bisnis yang lebih inovatif, memperluas jaringan kerja sama, serta menciptakan dampak ekonomi yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena

itu, investasi dalam peningkatan kapasitas SDM harus menjadi prioritas utama dalam strategi pengelolaan BUMDes agar dapat menjadi instrumen yang benar-benar efektif dalam membangun kemandirian ekonomi desa.

Pemanfaatan Digitalisasi dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan BUMDes

Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam meningkatkan efektivitas dan daya saing usaha desa. (Hadi 2024). Digitalisasi tidak hanya mempercepat proses bisnis, tetapi juga memberikan kemudahan dalam pencatatan transaksi, memperluas akses pemasaran, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Dalam konteks yang lebih luas, transformasi digital juga membuka peluang bagi BUMDes untuk mengembangkan inovasi layanan yang lebih modern dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Salah satu aspek digitalisasi yang sangat berpengaruh dalam pengelolaan BUMDes adalah penerapan sistem keuangan berbasis teknologi. Banyak BUMDes masih mengandalkan pencatatan manual dalam operasional keuangannya, yang sering kali menyebabkan ketidaktepatan dalam perhitungan serta minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Dengan menggunakan aplikasi keuangan berbasis digital, pengelola BUMDes dapat mencatat transaksi secara *real-time,* menghindari potensi kecurangan, serta memudahkan proses audit. Sistem ini juga memungkinkan pemerintah desa serta masyarakat mengakses laporan keuangan BUMDes secara lebih transparan, sehingga kepercayaan terhadap pengelolaan usaha desa dapat meningkat.

Pada aspek pemasaran, digitalisasi juga berperan dalam optimalisasi distribusi produk BUMDes. Kendala utama yang sering dihadapi BUMDes adalah terbatasnya akses pasar bagi produk unggulan desa. Melalui pemanfaatan teknologi digital, BUMDes dapat memperluas jangkauan pemasaran melalui berbagai platform *e-commerce*, seperti Shopee, Tokopedia, serta marketplace lokal yang mendukung produk usaha desa. Media sosial juga menjadi alat efektif dalam membangun citra usaha dan meningkatkan visibilitas produk kepada konsumen yang lebih luas. Strategi pemasaran digital ini memungkinkan produk unggulan desa dikenal oleh masyarakat di berbagai wilayah, bukan hanya di tingkat lokal, tetapi juga nasional hingga internasional.

Penerapan teknologi tidak hanya terbatas pada pemasaran, tetapi juga dapat diterapkan dalam pengelolaan layanan berbasis komunitas. (Idrus et al. 2025). BUMDes yang bergerak di bidang penyediaan jasa, seperti pengelolaan air bersih desa, simpan pinjam, transportasi desa, atau penyewaan alat pertanian, dapat memanfaatkan aplikasi berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi layanan. Dengan sistem berbasis aplikasi, masyarakat dapat mengakses layanan BUMDes dengan lebih mudah, melakukan pembayaran secara digital, serta mendapatkan informasi yang lebih transparan mengenai biaya dan prosedur layanan. Digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga membantu pengelola dalam mengelola operasional usaha secara lebih efisien. Meskipun digitalisasi memberikan berbagai manfaat bagi pengelolaan BUMDes, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat literasi digital di kalangan pengelola BUMDes dan masyarakat desa. Banyak pengelola yang belum terbiasa menggunakan sistem digital dalam operasional usaha, sehingga masih bergantung pada metode konvensional yang kurang efisien. Tantangan lainnya adalah keterbatasan infrastruktur digital, seperti jaringan internet yang belum merata di beberapa daerah, yang menjadi hambatan dalam mengadopsi teknologi berbasis digital

secara optimal.

Upaya untuk mengatasi tantangan tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan dan pendampingan digital bagi pengelola BUMDes. Pelatihan dapat difokuskan pada pengenalan teknologi keuangan digital, strategi pemasaran daring, serta pemanfaatan platform *e-commerce* dalam pengembangan usaha desa. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan digital, serta sektor swasta yang memiliki pengalaman dalam penerapan teknologi digital dalam bisnis. Pemerintah juga perlu memberikan dukungan dalam bentuk penguatan infrastruktur teknologi, seperti penyediaan akses internet yang lebih luas serta subsidi teknologi bagi BUMDes yang baru mengadopsi sistem digital.

Selain melalui pelatihan dan penguatan infrastruktur, penggunaan sistem pembayaran digital juga perlu diperluas dalam transaksi keuangan BUMDes. Sistem pembayaran berbasis QRIS *(Quick Response Code Indonesian Standard)* dapat digunakan untuk memudahkan transaksi keuangan antara BUMDes dan masyarakat, sehingga mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai yang sering kali lebih sulit ditelusuri dan dicatat. Dengan adanya sistem pembayaran digital, transaksi menjadi lebih transparan, aman, serta dapat dipantau secara lebih akurat oleh pengelola BUMDes maupun pihak terkait.

Penerapan digitalisasi yang optimal akan meningkatkan efektivitas pengelolaan usaha, mempercepat proses bisnis, serta memperluas jangkauan pasar dengan lebih efisien. Digitalisasi bukan hanya menjadi alat untuk meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga strategi dalam memperkuat daya saing usaha desa dalam menghadapi persaingan ekonomi yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, percepatan adopsi teknologi digital dalam pengelolaan BUMDes harus menjadi salah satu prioritas utama dalam mendorong pembangunan ekonomi desa yang lebih modern, inklusif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang efektif memegang peranan penting dalam mendorong kemandirian ekonomi desa. Berbagai strategi diperlukan untuk memastikan BUMDes dapat berkembang secara optimal, mulai dari penerapan tata kelola yang baik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan digitalisasi, hingga penguatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Setiap aspek ini saling berkaitan dan menjadi faktor utama dalam memastikan keberlanjutan usaha desa di tengah dinamika ekonomi yang semakin kompetitif.

Penerapan tata kelola berbasis *good governance* menjadi landasan utama dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan usaha desa. Keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas serta mekanisme pengawasan yang ketat sangat diperlukan agar setiap keputusan dalam pengelolaan BUMDes dapat diambil secara profesional dan bertanggung jawab. Tanpa adanya sistem tata kelola yang baik, BUMDes berisiko mengalami stagnasi bahkan kegagalan akibat lemahnya sistem pengelolaan keuangan dan administrasi.

Selain aspek tata kelola, kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan BUMDes. Pengelola yang memiliki kompetensi dalam manajemen usaha, strategi pemasaran, serta pengelolaan keuangan akan mampu mengarahkan BUMDes ke arah yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, program pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan perlu diterapkan guna meningkatkan kapasitas pengelola dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam mendukung BUMDes juga perlu diperkuat agar usaha yang dijalankan dapat memberikan

manfaat ekonomi yang lebih luas bagi desa.

Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi juga menjadi faktor penentu dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMDes. Digitalisasi dalam sistem pencatatan keuangan, pemasaran produk, serta layanan berbasis aplikasi memungkinkan BUMDes untuk beroperasi lebih efisien dan transparan. Penggunaan platform *e-commerce* dan media sosial menjadi langkah strategis dalam memperluas akses pasar bagi produk desa, sehingga BUMDes tidak hanya bergantung pada pemasaran konvensional yang terbatas jangkauannya. Meski demikian, tantangan dalam literasi digital dan keterbatasan infrastruktur masih menjadi kendala yang perlu diatasi dengan dukungan dari pemerintah dan sektor swasta.

Keberlanjutan BUMDes juga sangat bergantung pada sinergi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, serta komunitas lokal. Kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dapat memperkuat akses permodalan, meningkatkan kapasitas usaha, serta memperluas jaringan pemasaran. Dengan adanya kolaborasi yang baik, BUMDes dapat berkembang menjadi entitas bisnis yang lebih profesional dan mampu bersaing dalam skala yang lebih luas.

Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan BUMDes tidak hanya bergantung pada satu faktor, tetapi merupakan hasil dari kombinasi berbagai elemen strategis yang saling mendukung. Tata kelola yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, digitalisasi yang optimal, serta dukungan dari berbagai pihak menjadi faktor utama dalam memastikan BUMDes dapat berkembang secara berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya perbaikan dalam setiap aspek pengelolaan harus terus dilakukan agar BUMDes dapat benar-benar berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi desa yang mandiri dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

Adolph, Ralph. 2024. “Pelaksanaan Dan Pengelolaan BUMDES Di Desa Sentang” 10 (April): 1–23.

Artikel, Informasi. 2024. “Optimalisasi Digital Sebagai Sarana Penguatan Transparansi Dan Partisipasi BUMDes Dalam Pengelolaan Pariwisata” 6:539–45.

Azhari, Azhari, Moh . Mustofa, Erika Dwi Meisari, and Erika Tri Setia Anggarista. 2023. “Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* 14 (2): 82–92. https://doi.org/10.36982/jiegmk.v14i2.3392.

Boge Triatmanto , Gaguk Apriyanto , Syarif Hidayatullah, dkk. 2024. *Model Pemberdayaan Masyarakat Holistik : Berorientasi Potensi Lokal*. Uwais Inspirasi Indonesia.

Ekonomi, Jurnal. 2024. “JEMeS” 7 (2): 53–66.

Elvia, Viny, M Fachri Adnan, and Afriva Khaidir. 2025. “The Role of Technology in Achieving Good Governance : A Public Administration Theory Perspective” 5 (1): 199–206. https://doi.org/10.58737/jpled.v5i1.400.

Hadi, Miftahul. 2024. “ANALISIS KESIAPAN DAN PENERIMAAN TEKNOLOGI DALAM” 16 (2): 269–88.

Hintalo, Sintiya, Asna Aneta, and Rustam Tohopi. 2024. “Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.” *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 10 (1): 68–86. https://doi.org/10.25299/jiap.2024.16316.

Idrus, Sitti Hairani, La Ode, Muhammad Elwan, La Ode Aslim, Fakultas Ilmu, Ilmu Politik, and Universitas Halu. 2025. “DIGITALISASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN

PEMBANGUNAN DESA SE-KECAMATAN RANOMEETO BARAT" 4 (1): 18–28.

Jayadi, Haeruman. 2024. "Tantangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa Obstacles Faced by Village-Owned Enterprises (Bumdes) In Attaining Village Autonomy" 9 (2).

Meida Rachmawati. 2024. "Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia Terhadap Pengembangan Badan Usaha Milik Desa." *Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi (Jrime)* 2 (2): 64–74. https://doi.org/10.54066/jrime-itb.v2i2.1491.

Pengembangan, Jurusan, Masyarakat Islam, Universitas Islam, and Negeri Sumatera Utara. 2025. "Published: 3 Januari 2025" 3:24–30.

Ramadhan Lubis, Putri Nabila, Nurul Ilmi Nasution, Lathifah Azzahra, Hasraful, and Fadillah Andina6. 2024. "Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran, Volume 7 Nomor 3, 2024." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7 (3): 7899–7906.

Rizky Mulyana, Maemunah, Isnaini, Hasan, Hafsah, Ayu Sadana Prihatin Ningsih. 2024. "Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pembangunan Desa Melalui Pemberdayaan Masyarakat."

Rohayatin, Titin, Dadan Kurnia, Noer Apptika Fujilestari, Siti Munawaroh Ilmu Pemerintahan, Universitas Jenderal Achmad Yani, Kota Cimahi Alamat Korespondensi, Jl Terusan Jenderal Soedirman, and Cimahi Selatan -Kota Cimahi. 2024. "Optimalisasi Sumber Daya Manusia Melalui Tata Kelola Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Penerapan E-Government Di Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang" 06 (01): 1–10.

Syahsudarmi, Siti, Rasyid Abdillah, Ririn Handayani, and Adi Rahmat. n.d. "PENDAMPINGAN PENYUSUNAN SOP DALAM MENINGKATKAN," no. 0761.

Wulandari, Gusti Putu Mutia, and Ni Putu Nina Eka Lestari. 2024. "Transformasi Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Era Digital." *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 7 (3): 263–81. https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i3.3336.